

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, DESENTRALISASI
FISKAL DAN KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP KORUPSI DI
INDONESIA**



Skripsi Oleh :

HASNA NIRWANA ZASKHIR

01031382126137

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP KORUPSI DI INDONESIA

Disusun oleh:

Nama : Hasna Nirwana Zaskhir
NIM : 01031382126137
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan



Tanggal: 28 Mei 2025

Dosen Pembimbing



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197212152003122001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP KORUPSI DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Nama : Hasna Nirwana Zaskhir

NIM : 01031382126137

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah Skripsi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 02 Juli 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 04 Juli 2025

Ketua,



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak
NIP. 197212152003122001

Anggota,



Dr. Ika Sasti Fenna, S.E., M.Si., Ak
197802102001122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak
NIP. 197212152003122001

ASLI

JURUSAN AKUTANSI

FAKULTAS EKONOMI UNSRI

14/5
/07

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hasna Nirwana Zaskhir

NIM : 01031382126137

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP KORUPSI DI INDONESIA

Pembimbing : Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak

Tanggal Ujian : 2 Juli 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 10 Juli 2025

Pembuat Pernyataan,



Hasna Nirwana Zaskhir

NIM. 01031382126137

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Allah tidak membebanimu seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Papa dan mama
- Adikku
- Sahabat
- Almameter

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Terhadap Korupsi di Indonesia”. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar skripsi ini dapat diperbaiki dan dikembangkan menjadi lebih baik, sehingga memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Palembang, Juli 2025

Penulis

Hasna Nirwana Zaskhir

NIM. 01031382126137

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terwujud tidak terlepas dari arahan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi. Rasa terima kasih akan penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT atas seluruh nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAc., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
5. Ibu Patmawati, SE, M.Si., Ak., CA., CSRS, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk membimbing, memberikan arahan, motivasi, dan mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis memperoleh banyak pelajaran berharga dari beliau.
7. Ibu Dr. Ika Sasti Ferina, S.E.,M.Si.,Ak selaku Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif, merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi penulis. Terima kasih telah memberikan waktu, saran, dan dukungan kepada penulis guna menyempurnakan karya ini.
8. Ibu Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam perkuliahan sejak semester pertama hingga semester akhir.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan, serta

segenap Staff Tata Usaha Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik selama perkuliahan.

10. Kedua Orang Tuaku, Papa Akhiruddin Amir dan Mama Arizasma yang sangat penulis cintai, terima kasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu tak henti diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan perasaan yang tulus dan tepat pada waktunya.
11. Adikku, teman terbaikku, Caca dan Hatta tersayang, yang telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Angelitang Sibe Ruing, Abel Azuari dan Nabila Azzahra. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, terima kasih untuk semua kenangan baik di masa perkuliahan ini.
13. Temanku tersayang, Athira Nisrina. Terimakasih telah mendengarkan semua curhatan penulis selama masa perkuliahan ini serta terimakasih telah menjadi teman maupun sahabat yang baik aen.
14. Sahabat-sahabat SMA-ku. Nindya, Dira dan Piyah. Terima kasih karena selalu menemani dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan Adinda Aprilia Cesyoria, Keysa Amelia, Ike Meilisa, Rahma Maulita, Syevi Zahra, dan Verdiansyah. Terimakasih atas saran dan kerja samanya.
16. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2021 atas setiap pengalaman, kenangan, dan kerja samanya selama ini.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, masukan, dan doa kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penyusunan skripsi ini.
18. Hasna Nirwana Zaskhir, last but no least, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah,

serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan na.

Palembang, 10 Juli 2025

Hasna Nirwana Zaskhir
01031382126137

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Hasna Nirwana Zaskhir

NIM : 01031382126137

Jurusan : Akuntansi

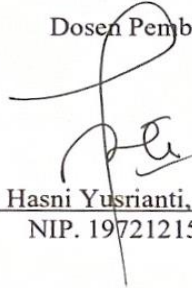
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Terhadap Korupsi di Indonesia

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

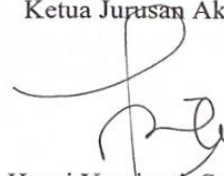
Indralaya, 10 Juli 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak
NIP. 197212152003122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak
NIP. 197212152003122001

ABSTRAK

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH, DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP KORUPSI DI INDONESIA

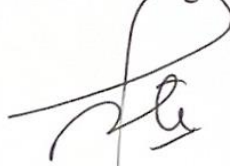
Oleh:

Hasna Nirwana Zaskhir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah, desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah terhadap korupsi di Indonesia. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data keuangan pemerintah daerah melalui portal DJPK dan website Mahkamah Agung. Populasi pada penelitian ini pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2023. Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 170 sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan bantuan software Eviews 12. Hasil penelitian menyatakan Kinerja Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Dan Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Daerah, Korupsi, Pemerintah Daerah

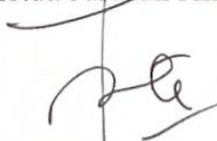
Pembimbing



Dr. Hasni Yusrianti, S.E. M.A.A.C., Ak

NIP. 197212152003122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E. M.A.A.C., Ak

NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE, FISCAL DECENTRALIZATION AND REGIONAL INDEPENDENCE ON CORRUPTION IN INDONESIA

By:

Hasna Nirwana Zaskhir

This study aims to analyze the effect of regional financial performance, fiscal decentralization and regional independence on corruption in Indonesia. The type of data in this study uses secondary data obtained from regional government financial data through the DJPK portal and the Supreme Court website. The population in this study was the provincial government in Indonesia in 2019-2023. While the sample of this study was 170 samples using the purposive sampling method. This study uses multiple linear analysis with the help of Eviews 12 software. The results of the study stated that Regional Financial Performance, Fiscal Decentralization, and Regional Independence had a significant positive effect on Corruption in Indonesia.

Keywords: Regional Financial Performance, Fiscal Decentralization, Regional Independence, Corruption, Regional Government

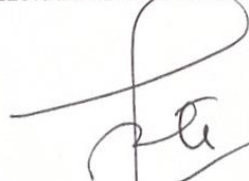
Pembimbing



Dr. Hasni Yusrianti, S.E. M.A.A.C., Ak

NIP. 197212152003122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E. M.A.A.C., Ak

NIP. 197212152003122001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa	: Hasna Nirwana Zaskhir
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Padang/ 06 Mei 2003
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jl. Macan lindungan, Komp. Grandhill Residence
Email	: hasnanirwanaz@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah dasar (SD)	: SD Negeri 45 Lubuklinggau
Sekolah Menengah Pertama	: MTS Negeri 1 Lubuklinggau
Sekolah Menengah Atas	: MAN 2 Padang
Perguruan Tinggi	: S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwija

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 2022	: Staff Sosial Dan Rohani IMA FE UNSRI
Tahun 2023	: Staff Ahli Dinas Ektifbis BEM KM FE UNSRI

PENGALAMAN MAGANG

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang (2024)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSİ	II
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	III
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR.....	VI
UCAPAN TERIMAKASIH	VII
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	X
ABSTRAK	XI
<i>ABSTRACT</i>	XII
RIWAYAT HIDUP	XIII
PENDIDIKAN FORMAL	XIII
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR TABEL.....	XVII
DAFTAR GAMBAR	XVIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIX
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)	10
2.1.2 Teori Fraud Triangle	11
2.1.3 Korupsi.....	12
2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah.....	14

2.1.5 Desentralisasi Fiskal	15
2.1.6 Kemandirian Daerah	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran	24
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	26
2.4.1 Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Korupsi	26
2.4.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Korupsi	27
2.4.3 Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Korupsi	28
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	31
3.2 Rancangan Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Populasi dan Sampel.....	32
3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	33
3.6.1 Variabel Dependen	34
3.6.2 Variabel Independen	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
3.7.1 Uji Statistik Deskriptif.....	37
3.7.2 Estimasi Regresi Data Panel.....	37
3.7.3 Uji Pemilihan Model.....	39
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.7.4 Analisis Regresi Data Panel.....	43
3.8 Uji Hipotesis.....	44
3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	44
3.8.2 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	44
3.8.3 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)	45
BAB IV	46
PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif	46
4.1.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel	48
4.1.4 Uji Asumsi Klasik.....	49
4.1.6 Uji Hipotesis	52
4.2 Pembahasan Penelitian	55
4.2.1 Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Korupsi	55
4.2.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Korupsi	56
4.2.3 Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Korupsi	58

BAB V	60
KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Implikasi Penelitian.....	61
5.2.1 Implikasi Secara Teoritis.....	61
5.2.2 Implikasi Secara Praktis.....	61
5.3 Keterbatasan Penelitian	62
5.4 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3. 1 Kriteria sampel penelitian	33
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel	36
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	47
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow	48
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman	49
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4. 6 Hasil Uji Signifikasi	51
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	52
Tabel 4. 8 Hasil Uji F	53
Tabel 4. 9 Hasil Uji T	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	25
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1. Data Daerah Sampel	70
Lampiran. 2 Hasil Tabulasi Data	71
Lampiran. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	77
Lampiran. 4 Hasil Uji Chow	78
Lampiran. 5 Hasil Uji Hausman	78
Lampiran. 6 Hasil Uji Multikolinearitas	78
Lampiran. 7 Hasil uji Heteroskedastisitas	79
Lampiran. 8 Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia adalah korupsi. Masalah korupsi di Indonesia adalah isu serius yang telah menjadi perhatian utama baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Korupsi tidak hanya berdampak negatif terhadap perekonomian, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah masalah signifikan dalam pemerintahan yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat akibat alokasi anggaran publik yang tidak tepat, yang seharusnya difokuskan untuk mendukung peningkatan pembangunan manusia (Anantika & Sasana, 2020). Selain menyebabkan kerugian finansial bagi negara, korupsi juga memiliki dampak non-finansial, seperti menurunkan kredibilitas sistem akuntabilitas pemerintah, melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan mengganggu layanan publik (Maria & Halim, 2021).

Indonesia masih menghadapi bayang-bayang praktik korupsi, yang merupakan salah satu tantangan besar yang perlu diatasi. Korupsi masih sering terjadi di berbagai sektor, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah (Fuadi & Maburur, 2021). Maraknya praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menghambat proses pembangunan di berbagai wilayah. Di Indonesia, jumlah kasus

korupsi yang dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan menunjukkan peningkatan yang signifikan tiap tahunnya.

Fenomena korupsi di Indonesia pada periode 2019-2023 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus terungkap. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa pada periode 2019 hingga 2023, kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah mendominasi tren kasus korupsi berdasarkan jenis instansi. Pada tahun 2019 terdapat 271 kasus, 2020 terdapat 444 kasus, tahun 2021 terdapat 533 kasus, tahun 2022 terdapat 579 kasus, dan tahun 2023 terdapat 791 kasus, dengan 1.695 tersangka dan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 28,4 triliun. Kasus-kasus ini mencakup berbagai sektor, termasuk pemerintahan daerah, dan meskipun terdapat upaya pemberantasan korupsi, tantangan besar dalam penanggulangan korupsi masih tetap ada.

Kasus korupsi yang melibatkan PT Andalas Bara Sejahtera di Sumatera Selatan mencuat setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Selatan menetapkan enam tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang dan izin pertambangan batu bara perusahaan tersebut. Kasus ini dilaporkan oleh *Antara Foto* dan menyebutkan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 555 miliar, dengan kerusakan lingkungan yang signifikan, yang terjadi pada periode 2010 hingga 2014 (AntaraFoto, 2024).

Pada tahun 2024, KPK memeriksa 12 saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Kasus ini melibatkan 21 tersangka, termasuk Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahat Tua P. Simanjuntak, yang divonis 9 tahun penjara karena menerima suap terkait dana

hibah. Total dana hibah mencapai Rp 200 miliar, dan Sahat diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 39,5 miliar (Yuantisya, 2024). Kasus ini mencerminkan tingginya tingkat korupsi dalam pengelolaan dana publik di daerah tersebut.

Laporan menurut *detiksumbagsel*, tahun 2016 hingga 2020 terjadi kasus korupsi proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan tiga tersangka dari PT Waskita Karya yang terlibat dalam proyek ini, yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 1,3 triliun (Syahbana, 2024). Sebelum penetapan tersangka, sebanyak 34 saksi telah diperiksa. Modus operandi yang terungkap meliputi mark-up kontrak pekerjaan perencanaan dan aliran dana suap atau gratifikasi sebesar Rp 25,6 miliar. Selain itu, penyidik juga menyita uang sejumlah Rp 2,088 miliar yang merupakan sisa aliran dana tersebut. Proses penyidikan masih berlanjut dan kemungkinan akan ada tersangka tambahan di kemudian hari.

Berbagai penelitian telah dilakukan guna menguji pengaruh kinerja keuangan daerah, desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah terhadap korupsi. Ada beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap korupsi diantaranya kinerja keuangan daerah. Faktor pertama adalah kinerja keuangan daerah, kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan rencananya dengan baik dan benar (Fahmi, 2011). Pada penelitian (Suhardjanto et al., 2020) menunjukkan kinerja keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi. Namun pada penelitian (Sapitri & Arza, 2024) dan

(Wicaksono & Prabowo, 2022) menunjukkan kinerja keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap korupsi.

Faktor kedua yaitu desentralisasi fiskal, desentralisasi fiskal adalah hasil dari penerapan otonomi daerah di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah terutama dalam aspek fiskal (Mega Christia & Ispriyarso, 2019). Seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal berfokus pada penguatan kapasitas keuangan daerah agar dapat mengelola sumber daya secara lebih mandiri dan efisien. Pada penelitian (Fatimah et al., 2023), dan (Maria et al., 2019) dan (Fatoni, 2020). Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap korupsi.

Faktor ketiga yakni kemandirian daerah, kemandirian daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya, dimana pembangunan daerah dapat terwujud jika didukung oleh kemandirian daerah yang efektif (Putra & Hidayat, 2016). Pada penelitian (Yusuf & Suryaningrum, 2022) dan (Maria et al., 2021) dan (Firansyah & Rika Gamayuni, 2024) kemandirian daerah berpengaruh terhadap korupsi. Namun pada penelitian (Nuruddin & Rahmawati, 2021) menunjukkan kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap korupsi.

Korupsi merupakan salah satu faktor pencetus kinerja keuangan daerah yang buruk, karena praktik korupsi dapat mengganggu pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Akibatnya, kinerja keuangan daerah menurun, yang tercermin dalam laporan keuangan yang tidak transparan dan tanggung jawab yang rendah. Kinerja keuangan yang buruk dapat menciptakan tekanan pada pejabat daerah untuk terlibat dalam praktik korupsi guna mencapai target atau mendapatkan

pendanaan (Verawaty et al., 2020). Hal ini diperparah oleh kurangnya pengawasan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, yang memungkinkan tindakan korupsi tidak terdeteksi.

Desentralisasi fiskal berkontribusi pada korupsi karena memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, tanpa diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Di Indonesia, semakin tinggi tingkat desentralisasi, semakin banyak peluang bagi pejabat daerah untuk menyalahgunakan kekuasaan dan mengakses dana publik tanpa kontrol yang ketat. Hal ini disebabkan oleh pelimpahan kewenangan yang dapat menciptakan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah, serta kurangnya tanggung jawab dalam penggunaan dana publik (Saputra, 2012). Meskipun desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, kenyataannya malah menyebabkan peningkatan kasus korupsi, yang menunjukkan bahwa dampak negatif dari desentralisasi fiskal sering kali lebih terlihat dibandingkan manfaatnya dalam pelayanan publik.

Kemandirian daerah berperan penting dalam meningkatkan potensi korupsi. Kemandirian keuangan daerah yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai operasionalnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau pinjaman eksternal. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menyebabkan kompleksitas dalam aturan keuangan, yang menciptakan peluang untuk praktik korupsi (Yusuf & Suryaningrum, 2022). Semakin besar alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk belanja daerah, terutama dalam investasi publik seperti pembangunan infrastruktur,

semakin tinggi pula risiko korupsi. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan dana yang tidak transparan dan adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

Objek riset ini berfokus pada pengaruh kinerja keuangan daerah, desentralisasi fiskal, dan kemandirian daerah terhadap korupsi di Indonesia. Penelitian ini mencakup berbagai pemerintah daerah di seluruh di Indonesia, khususnya di tingkat provinsi. Pemilihan objek riset ini didasarkan pada tingginya tingkat korupsi di Indonesia, yang didominasi oleh kasus korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Salah satu penyebab korupsi adalah pandangan yang keliru terhadap harta dan kekayaan. Pandangan yang tidak tepat mengenai kekayaan dapat menyebabkan cara yang salah dalam mengakses atau memperoleh harta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah dapat mempengaruhi praktik korupsi, serta memahami dinamika antara otonomi daerah dan tantangan dalam pengelolaan keuangan publik yang efektif.

Penelitian ini akan menguji pengaruh kinerja keuangan daerah, desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah terhadap korupsi. Penelitian ini akan membantu memahami seberapa baik kebijakan desentralisasi melawan korupsi dan meningkatkan transparansi dan kinerja keuangan daerah di pemerintahan daerah. Hasilnya juga akan menyediakan saran kepada pembuat kebijakan agar mereka memiliki strategi yang lebih efektif untuk mengurangi korupsi.

Penelitian ini merupakan hasil modifikasi dan pengembangan dari studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Pramesti & Haryanto, 2019) dalam jurnal berjudul Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota di

Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus variabel, di mana penelitian ini meneliti pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah terhadap korupsi. Objek dan periode waktu dalam penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu berfokus pada pemerintah kabupaten dan kota provinsi Jawa Tengah dengan data dari tahun 2014-2017, sedangkan penelitian ini meneliti wilayah Indonesia khususnya di tingkat provinsi dengan data dari tahun 2019-2023.

Berdasarkan latar belakang tersebut pemerintahan daerah di Indonesia menghadapi masalah serius terkait korupsi. Oleh karena itu, dinilai penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya korupsi di pemerintahan daerah. Maka, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, dan Kemandirian Daerah Terhadap Korupsi di Indonesia”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Terhadap Korupsi di Indonesia dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap korupsi di Indonesia?
- c. Bagaimana pengaruh kemandirian daerah terhadap korupsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Korupsi di Indonesia
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Korupsi di Indonesia
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kemandirian Daerah terhadap korupsi di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat member manfaat ke berbagai pihak sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat menambah literatur dan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara Kinerja keuangan daerah, desentralisasi fiskal, dan kemandirian daerah dengan tingkat korupsi. Diharapkan, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi korupsi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai area pengawasan yang perlu diperkuat, sehingga dapat membantu pengembangan strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa merasakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dari berkurangnya korupsi, seperti peningkatan kualitas layanan publik dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- alamsyah, a. F. (2006). Ahmad fahrudin alamsyah. *El harkah jurnal budaya islam*, 8(3), 335–349.
- Anantika, d. A., & sasana, h. (2020). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di negara apec. *Diponegoro journal of economics*, 9(3), 167–178.
- Andirfa, m. (2018). *Kinerja keuangan pemerintah daerah “suatu kajian terkait belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah di provinsi aceh”* (maryana & b. Rahman, eds.). Unimal press.
- Andriana, n. (2020). Pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kemandirian daerah. *Jurnal pajak dan keuangan negara (pkn)*, 1(2), 105–113. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Anggono, g. T., & haryanto. (2024). Pengaruh desentralisasi fiskal, akuntabilitas, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) terhadap indikasi korupsi di *Diponegoro journal of accounting*, 13, 1–13.
- Anggoro, w. B. W. N., & setyanto, r. P. (2024). The impact of family dynamics on marketing performance: the role of marketing agility as a mediating variable in the context of smes. Wisanggeni. *International journal of business and quality research*, 02(04), 75–87.
- Antarafoto. (2024). *Penetapan enam tersangka kasus korupsi pertambangan di sumsel*. <https://www.antarafoto.com/id/view/2259111/penetapan-enam-tersangka-kasus-korupsi-pertambangan-di-sumsel>
- Anynda, n. S., & hermanto, s. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 9. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.732>
- Apriliawan, d., tarno, & yasin, h. (2013). *Pemodelan laju inflasi di provinsi jawa tengah menggunakan regresi data panel dody*. 2(18).
- Assyifa, b. S. A., & muttaqin, a. A. (2024). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengalokasian belanja modal di kabupaten dan kota nusa tenggara barat. *Journal of development economic and social studies*, 3(1), 16–28. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.2>
- Astuti, a. M. (2010). Fixed effect model pada regresi data panel. *Beta*, 3(2), 134–145.

- Damping, n. M. (2019). *Hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan dimensi sistematik hukum khusus* (wiwik sri widiarty, ed.). Universitas kristen indonesia (uki) press.
- Dilliana, s. M., & herdi, h. (2022). *Manajemen keuangan daerah* (d. Winarni, ed.). Eureka media aksara.
- Ernita, d. (2024). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di provinsi jambi. *Jurnal emt kita*, 8(3), 937–947. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2690>
- Fahmi, i. (2011). Analisis kinerja keuangan dalam perspektif rasio likuiditas pada keputusan sebelum dan sesudah right issue. *Gema*, ii(2), 11–23.
- Fatimah, s., yasin, m., manan, a., salmah, e., & sriningsih, s. (2023). Analisis variabel determinan tingkat korupsi di indonesia. *Journal of economics and business*, 9(2), 39–52. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v9i2.150>
- Fatoni, a. (2020). Fiscal decentralization dilemma in indonesia: between corruption accountability and probability at local levels. *Jurnal bina praja*, 12(1), 101–110. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.101-110>
- Firansyah, b. T., & rika gamayuni, r. (2024). The effect of regional financial characteristics and transparency on corruption potential: study on regency / city governments in indonesia in 2020-2022. *International journal of advanced multidisciplinary research and studies*, 4(3), 1130–1139. <https://doi.org/10.62225/2583049x.2024.4.3.2912>
- Fuadi, i., & mabrur, a. (2021). Faktor-faktor penentu korupsi pada pemerintah daerah di indonesia. *Indonesian treasury review jurnal perbendaharaan keuangan negara dan kebijakan publik*, 6(4), 317–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.410>
- Gedeona, h. T. (2009). Desentralisasi fiskal: kajian perbandingan ketidakseimbangan fiskal vertikal di indonesia dan jepang. *Jurnal ilmu administrasi*, 6(2), 167–193.
- Ghozali, i. (2019). *Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 25* (9th ed.).
- Hakiki, d., tumija, & agustina, i. (2023). Rasio kemandirian daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sekadau author. *Jurnal ekonomi dan keuangan publik*, 10(1), 56–78.
- Hanafî, i., yahman, rahmawati, & mahka, muh. F. R. (2023). *Pendidikan anti korupsi : evaluasi dan pemantauan*. Pt. Literasi nusantara abadi grup.

- Hidayat, m., hadi, m. F., & widiarsih, d. (2016). Analisis kemampuan keuangan kabupaten/kota di provinsi sumatera barat dalam era otonomi daerah. *Jurnal sungkai*, 4(2), 36–55.
- Holung, r. L., kawung, g. M. V., & tumangkeng, s. (2021). Pengaruh kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado. *Jurnal emba: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*, 9(1), 869–877.
- Husnul, n. R. I., prasetya, e. R., sadewa, p., ajimat, & purnomo, l. I. (2020). *Statistik deskriptif* (m. M. Listiya ike purnomo, s.e., ed.). Unpam press.
- Irnawati, saripuddin, & abidin, z. (2023). *Analisis kinerja keuangan daerah pada kota makasar*. 4, 403–416.
- Ismanto, h., & pebruary, s. (2021). Aplikasi spss dan evIEWS dalam analisis data penelitian. *Sustainability (switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Jensen, m. C., & meckling, w. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 4, 305–360.
- Karmeli, e., haryadi, w., & muslimin, m. (2022). Analisis kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten sumbawa. *Jurnal ekonomi & bisnis*, 10(1), 52–60. <https://doi.org/10.58406/jeb.v10i1.730>
- Kaunang, c. E., naukoko, a. T., & londa, a. T. (2016). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: studi pada kota manado (tahun 2010-2014). *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 16(2), 355–365.
- Khikmah, l., & purwanto, a. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan fairness laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro journal of accounting*, 12(1), 1–13.
- Lesmono, b., & siregar, s. (2021). Studi literatur tentang agency theory. *Ekonomi, keuangan, investasi dan syariah (ekuitas)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Liu, j., & lin, b. (2012). Government auditing and corruption control: evidence from china's provincial panel data. *China journal of accounting research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Machmud, m., kawung, g., & rompas, w. (2014). Analisis kinerja keuangan daerah di provinsi sulawesi utara tahun 2007-2012. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 14(2), 1–13.

- Maisyuri. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah kota lhokseumawe. *Jurnal visioner & strategis*, 6. <https://doi.org/10.29103/jak.v5i1.1813>
- Maria, e., & halim, a. (2021). E-government dan korupsi: studi di pemerintah daerah, indonesia dari perspektif teori keagenan. *Ekuitas: jurnal ekonomi dan keuangan*, 5(1), 40–58. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789>
- Maria, e., halim, a., & suwardi, e. (2018a). Eksplorasi faktor tekanan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah indonesia. *Jurnal akuntansi publik*, 1(1), 111–126. <https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p111-126>
- Maria, e., halim, a., & suwardi, e. (2018b). Eksplorasi faktor tekanan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah indonesia. *Jurnal akuntansi publik*, 1(1), 111–126. <https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p111-126>
- Maria, e., halim, a., & suwardi, e. (2021). Financial distress, regional independence and corruption: an empirical study in indonesian local governments. *Journal of accounting and strategic finance*, 4(1), 54–70.
- Maria, e., halim, a., suwardi, e., & miharjo, s. (2019). Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: sebuah bukti empiris dari indonesia. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2036>
- Mariska srihardianti, mustafid, a. P. (2016). Metode regresi data panel untuk meramalkan penjualan energi di indonesia. *Bandung conference series: statistics*, 2(2), 475–485. <https://doi.org/10.29313/bcss.v2i2.4739>
- Martini, m. (2012). Causes of corruption in indonesia. *Anti corruption resources centre, august 2012*, 11.
- Masruroh, a., tania, t. E., & kustiwi, i. A. (4693). Pengaruh audit internal dalam upaya pencegahan korupsi (studi literatur). *Scientific african*, 114(june), e00146.
- Mega christia, a., & ispriyarso, b. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di indonesia. *Law reform*, 15(1), 149–163.
- Nandita, d. A., alamsyah, l. B., jati, e. P., & widodo, e. (2019). Regresi data panel untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pdrb di provinsi diy tahun 2011-2015. *Indonesian journal of applied statistics*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.28950>
- Nurhemi, & r, g. S. (2015). Dampak otonomi keuangan daerah terhadap pertumbuhan. *Bulletin of monetary economics and banking*, 18.
- Nuruddin, m., & rahmawati, i. P. (2021). Fraud triangle dan korupsi pada pemerintah daerah di indonesia. *Jrak: jurnal riset akuntansi dan komputerisasi akuntansi*, 12(1), 110–124. <https://doi.org/10.33558/jrak.v12i1.2507>

- Pramesti, I., & Haryanto. (2019). Akuntabilitas dan tingkat korupsi pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. *Jurnal akuntansi aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat kemandirian keuangan daerah dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi. *Jurnal perspektif pembiayaan dan pembangunan daerah*, 3(4), 243–256. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526>
- Putri Endang Sukaesih, Indupurnahayu, H. (2024). Pengaruh fraud triangle pada kecurangan melalui analisis Beneish Ratio Index sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan. *Eco-fin*, 6(2), 279–289. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1009>
- Rohmadani, D. S., Yulsiati, H., & Sari, Y. (2024). Pengaruh kemandirian keuangan dan rasio utang terhadap keberlanjutan finansial pada provinsi di Indonesia. 13(3), 674–681.
- Sapitri, W., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal nuansa karya akuntansi*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jnka.v2i3.58>
- Saputra, B. (2012). The impact of fiscal decentralization on corruption in Indonesia. *Jurnal borneo administrator*, 8(3), 293–309.
- Saputri, N., Ruchjana, B. N., & Hasbullah, E. S. (2020). Penerapan model regresi data panel pada faktor fundamental dan teknikal harga saham sektor industri real estate. *Kubik: jurnal publikasi ilmiah matematika*, 5(1), 10–19. <https://doi.org/10.15575/kubik.v5i1.7939>
- Septianingsih, A. (2022). Pemodelan data panel menggunakan random effect model untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup di Indonesia. *Jurnal Lebesgue : jurnal ilmiah pendidikan matematika, matematika dan statistika*, 3(3), 525–536. <https://doi.org/10.46306/lb.v3i3.163>
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis perilaku korupsi aparatur pemerintah di Indonesia (studi pada pengelolaan bantuan sosial di era pandemi covid-19). *Jurnal media birokrasi*, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Sudiran, F. (2017). Mencegah korupsi di daerah dengan pengawasan oleh keaja. *Jurnal legalitas*, 2.
- Sudrajat, A., & Susilowati, D. (2015). Pengaruh kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Edico Utama, Jakarta. *Jurnal manajemen*, 03(1), 1–14.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Suhardjanto, d., djuminah, d., & agustiningsih, s. W. (2020). Regional financial performance, audit function, and corruption levels in indonesia. *Jurnal akuntansi dan bisnis*, 20(1), 81. <https://doi.org/10.20961/jab.v20i1.474>
- Suprayitno, b., & pradipto, r. (2017). Fiscal decentralization and corruption: the facts in regional autonomy in indonesia. *Journal of advanced research in law and economics*, 8(5), 1467–1483. [https://doi.org/10.14505/jarle.v8.5\(27\).09](https://doi.org/10.14505/jarle.v8.5(27).09)
- Syabhana, p. (2024). 34 saksi diperiksa bongkar korupsi rp 1,3 t proyek lrt sumsel, ini modusnya.
- Verawaty, jaya, a. K., puspanita, i., & nurhidayah. (2020). Pengaruh pad dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di sumatera selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>
- Wicaksono, g. S., & prabowo, t. J. W. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi pada pemerintah daerah di jawa tengah menggunakan teori fraud triangle. *Owner*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Winantisan, r. N. N., tulung, j. E., rumokoy, l. J., richarda, winantisan, n. N., tulung, j. E., & rumokoy, l. J. (2024). Pengaruh keberagaman usia dan gender pada dewan komisaris dan direksi terhadap kinerja keuangan perbankan di indonesia periode 2018- 2022. *Jurnal emba*, 12(1), 1–12.
- Yuantisya, m. (2024). Kpk periksa 12 saksi korupsi dana hibah apbd jawa timur. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/kpk-periksa-12-saksi-korupsi-dana-hibah-apbd-jawa-timur-1168573>
- Yusrianti, h., ghozali, i., kurniawan, s., & hakiki, a. (2023). Examining social influence on asset misappropriation tendency. *Kasetsart journal of social sciences*, 44(3), 843–854. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2023.44.3.22>
- Yusrianti, h., norma habsari, t., & prukumpai, s. (2016). The effect of financial and non-financial variables to firm performance: comparison between indonesia and thailand. *Jurnal akuntansi dan investasi*, 17(2), 118–131. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0049.118-131>
- Yusuf, m. A., & suryaningrum, d. H. (2022). Moderasi ukuran pemerintah daerah pada pengaruh kinerja keuangan daerah dan transparansi daerah terhadap tingkat korupsi. *Akuisisi: jurnal akuntansi*, 18(01), 98–112.